



Pemerintah Kabupaten
Jombang

#bangga
melayani
bangsa



RENCANA KERJA 2024



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
KABUPATEN JOMBANG**

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 137 Jombang



BKPSDMJOMBANG



BKPSDMJOMBANG

bkpsdm JOMBANG

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2024



BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN JOMBANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang merupakan amanah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dimana setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja). Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang telah disusun dalam tiga tahun sebagai amanah dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir tahun 2023, yaitu dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 bagi Kabupaten dan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 bagi Perangkat Daerah. Kedudukan dokumen RPD sama dengan RPJMD namun tidak memuat visi dan misi Bupati terpilih. Dokumen RPD dan Renstra menjadi landasan dalam penyusunan RKPD dan Renja tahunan Perangkat Daerah. Renja menjadi acuan atau pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dilingkup organisasi perangkat daerah selama periode satu tahun, serta sebagai wujud terselenggaranya fungsi manajemen yang diharapkan dapat menjadi pijakan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Rencana Kerja merupakan penjabaran sasaran organisasi perangkat daerah yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerjanya dan memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, sub kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan, antara lain menjelaskan



keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor lain.

Dengan Rencana Kerja yang matang diharapkan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam menunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan dapat mendukung peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Jombang, khususnya dilingkup Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Jombang, 13 Juli 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN JOMBANG**



BAMBANG SUNTOWO, S.E., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196709041992021002



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...	27
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	28
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	30
3.3 Program dan Kegiatan	33
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	42
BAB V : PENUTUP	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang yang menjelaskan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan. Perencanaan pembangunan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan sebagai pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan mendayagunakan berbagai potensi atau sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan yang baik diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan atau hambatan pembangunan yang dihadapi dalam mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan kebijakan otonomi daerah, Pemerintah Pusat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi dengan tujuan antara lain mendekatkan pelayanan kepada masyarakat setempat agar aspirasi kebutuhan masyarakat setempat dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, disusun Rencana Strategis Daerah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai perencanaan kerja jangka menengah (lima tahunan) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Namun karena kepala daerah Kabupaten Jombang pada Tahun 2023 telah berakhir maka kedudukan dokumen RPJMD diganti dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang memuat rencana pembangunan selama tiga tahun sebagaimana amanah dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir tahun 2023, yaitu dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 bagi Kabupaten dan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 bagi Perangkat Daerah. Kedudukan dokumen RPD sama dengan RPJMD namun tidak memuat visi dan misi Bupati terpilih.

Dokumen RPD dan Renstra menjadi landasan dalam penyusunan RKPD dan Renja tahunan Perangkat Daerah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Rencana kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat renja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra). Rencana kerja memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD. Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra PD.

Diharapkan Dokumen Renja Tahun 2024 yang telah disusun oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan sehingga pembangunan di Kabupaten Jombang khususnya bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dapat terealisasi dengan baik demi terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional sebagaimana nilai dasar atau *core value* ASN “BERAKHLAK” (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal Adaptif dan Kolaboratif yang telah dikeluarkan oleh Kementerian PANRB dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 dalam rangka meningkatkan Kinerja Birokrasi yang pada akhirnya mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat/aparatur.

1.2. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- n) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025;
- o) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pembentukan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
- p) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q) Peraturan Bupati Jombang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang;
- r) Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- s) Surat Edaran Bupati Jombang tanggal 29 Desember 2023 Nomor:050/4524/415.10/2023 Hal:Pedoman Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2024 dan Renja PD Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024-2026 sehingga tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah diharapkan, terarah dan terukur guna mewujudkan tujuan pembangunan yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu–isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Secara umum kegiatan evaluasi sama dengan menilai, karena aktifitas mengukur sudah termasuk didalamnya. Pengukuran, penilaian dan evaluasi merupakan kegiatan yang bersifat hierarki. Artinya ketiga kegiatan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara berurutan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 & Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam pengukuran kinerja dilakukan perbandingan antara kinerja yang sesungguhnya pada suatu periode atau pada saat pengukuran dilakukan dengan suatu pembanding tertentu, misalnya, dibandingkan dengan rencana, standar atau benchmark tertentu.

Sedangkan evaluasi berupaya lebih jauh untuk menemukan penjelasan-penjelasan atas outcome yang diobservasi dan memahami logika-logika didalam intervensi publik. Sistem pengukuran kinerja yang didesain dengan baik, sering diidentifikasi sebagai salah satu bentuk dari evaluasi.

Adapun pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2022 (tahun n-2) baik yang memenuhi target dan tidak memenuhi target atau bahkan melebihi target kinerja serta faktor – faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja dan tentunya kebijakan/rekomendasi yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut. Disamping itu juga disajikan perkiraan capaian tahun berjalan 2023 (tahun n-1) dan dapat kami disampaikan dalam tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022, Tabel 2.1



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.5.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penunjang pelayanan administrasi perkantoran	92%	100 %	-	-	-	-	100 %	109%
4.5.1.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah pemenuhan jasa administrasi teknis perkantoran	4 orang	4 orang	-	-	-	-	4 orang	100%
4.5.1.24	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	50 jenis	51 jenis	-	-	-	-	51 jenis	102%
4.5.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan	90%	95%	-	-	-	-	95%	106%
4.5.2.46	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah pengadaan sarana prasarana gedung kantor	18 unit	29 jenis barang	-	-	-	-	29 jenis barang	161%
4.5.2.47	Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat gedung kantor/ bangunan pendukungnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	9 jenis	6 jenis pemeliharaan gedung dan sarana penunjang	-	-	-	-	6 jenis pemeliharaan gedung dan sarana penunjang	67%
4.5.2.48	Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	8 jenis	8 jenis barang	-	-	-	-	8 jenis barang	100%
4.5.2.49	Pemeliharaan rutin/berkala /sedang/berat kendaraan dinas /kendaraan operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	57 kendaraan	41 kendaraan	-	-	-	-	41 kendaraan	72%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.5.2.64	Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	150 stel	49 stel	-	-	-	-	49 stel	33%
4.5.7	Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD	Persentase dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	97%	83,52 %	-	-	-	-	83,52 %	86%
4.5.7.1	Penyusunan rencana strategis SKPD	Jumlah dokumen Renstra	1 dokumen	0 dokumen	-	-	-	-	0 dokumen	0
4.5.7.2	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	100%
4.5.7.3	Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	Jumlah dokumen SOP, SPIP dan IKM Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan dokumen SAKIP yang tersusun	3 jenis	5 jenis dokumen	-	-	-	-	5 jenis dokumen	167%
01.07.04	Penyusunan laporan keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD	4 jenis	4 jenis dokumen laporan keuangan	-	-	-	-	4 jenis dokumen laporan keuangan	100%
01.71	Program Pendidikan,Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur	Persentase aparatur yang lulus diklat.	100%	169,94 %	-	-	-	-	169,94 %	169,94%
01.71.01	Fasilitasi Tugas Belajar	Jumlah PNS yang diberikan bantuan tugas belajar	4 orang	4 orang	-	-	-	-	4 orang	100%
01.71.02	Fasilitasi Diklat Prajabatan	Jumlah peserta diklat prajabatan yang dikirim	427 orang	419 orang	-	-	-	-	419 orang	98%
01.71.03	Fasilitasi Diklat Penjejjangan	Jumlah peserta diklatpim IV, III dan II	48 orang	46 orang	-	-	-	-	46 orang	96%
01.71.04	Fasilitasi Diklat Teknis/Fungsional	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis fungsional	256 orang	295 orang	-	-	-	-	295 orang	115%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.71.05	Fasilitasi Pengembangan Diklat	Jumlah aparaturnya perwakilan OPD yang mengikuti AKPK dan EDD	145 orang	140 orang perwakilan OPD	-	-	-	-	140 orang perwakilan OPD	97%
01.71.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi	Jumlah peserta yang lulus ujian dinas PI dan seleksi JPTP, serta assesment kompetensi	132 orang	492 orang	-	-	-	-	492 orang	373%
01.81	Program Pembinaan Aparatur	Persentase pegawai yang diusulkan sanksi hukuman disiplin	0,50%	0,42 %	-	-	-	-	0,42 %	119%
01.81.01	Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Aparatur	Jumlah jenis layanan administrasi kesejahteraan pegawai	15 jenis layanan	15 jenis layanan	-	-	-	-	15 jenis layanan	100%
01.81.02	Pembinaan Disiplin Aparatur	Jumlah dokumen monitoring pembinaan disiplin	10 dokumen	10 dokumen monitoring satker	-	-	-	-	10 dokumen monitoring satker	100%
01.81.03	Peningkatan Kinerja Aparatur	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	4 kegiatan	4 kegiatan	-	-	-	-	4 kegiatan	100% 75%
		Jumlah dokumen laporan kinerja Aparatur	12 dokumen	9 dokumen					9 dokumen	
01.83	Program Pengembangan Aparatur	Persentase berkas usulan formasi yang terverifikasi	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%
01.83.01	Fasilitasi Pemrosesan Jabatan Fungsional	Jumlah SK jabatan fungsional yang diproses	1300 SK	1405 SK	-	-	-	-	1405 SK	108%
01.83.02	Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan ASN dan Penataan Dokumen Arsip Kepegawaian Daerah	Jumlah dokumen/arsip kepegawaian yang dikelola Jumlah dokumen informasi data kepegawaian	8 dokumen	8 dokumen	-	-	-	-	8 dokumen	100%
01.83.03	Pemrosesan CPNS Daerah	Jumlah CPNS yang diproses	428 orang	314 orang	-	-	-	-	314 orang	73%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.83.04	Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara	Jumlah usulan formasi OPD	134 OPD	130 OPD	-	-	-	-	130 OPD	97%
01.84	Program Peningkatan Karir Aparatur	Persentase aparatur yang mendapatkan layanan karir kepegawaian pada tahun berkenaan	96%	97,96 %	-	-	-	-	97,96 %	102%
01.84.01	Fasilitasi Proses Pensiun PNS	Jumlah SK pensiun yang diusulkan tepat waktu	1117 SK	1151 SK	-	-	-	-	1151 SK	103%
01.84.02	Pemrosesan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala PNS	Jumlah Surat Kenaikan Gaji Berkala PNS yang diterbitkan Jumlah SK Kenaikan pangkat yang diusulkan	8475 SK 2900 SK	8578 SK 2551 SK	-	-	-	-	8578 SK 2551 SK	101% 88%
01.84.03	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir Aparatur	Jumlah dokumen inventarisasi mutasi pegawai	10 dokumen	10 dokumen	-	-	-	-	10 dokumen	100%
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5.03	KEPEGAWAIAN									
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur BKDPP	91 %	90%	90%	100,48 %	111,65%	-	91%	100%
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%	110 %	110%	-	100%	100%
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang tersusun	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	150%	-	-	-
		Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang tersusun	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	-	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	4 dokumen	100%
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja, pengendalian kinerja, dokumen SAKIP, dan dokumen kinerja lainnya yang	20 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100%	-	-	-
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	-	-	5 dokumen	100%
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	98%	98%	98%	100 %	102,04%	-	98%	100%
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%	100 %	100%	-	100%	100%
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup BKDPP yang difasilitasi	28 kali	14 kali	14 kali	14 kali	100%	-	-	-
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	-	-	53 orang/bulan	100%
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100 %	-	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	-	-	-	4 dokumen	100%
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun PD	6 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	-	-	-
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	-	-	3 laporan	100%
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Lapoan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran PD	18 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100%	-	-	-
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD	-	-	-	-	-	-	16 laporan	100%
5.03.01.2.03	Administrasi barang milik Daerah pada perangkat Daerah	Persentase pelaporan aset yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%
5.03.01.2.03.06	Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pengelolaan aset PD yang tersusun	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100 %	-	-	-
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	-	-	-	-	-	-	1 laporan	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.03.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Kepegawaian PD	100%	100%	100%	94%	94%	-	-	-
5.03.01.2.05.02	Pengadaan pakain Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	104 stel	54 stel	50 stel	48 stel	100%	-	-	-
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100,21 %	-	100%	100%
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	8 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	-	-	-
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	1 paket	100%
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	8 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	-	-	-
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	5 paket	100%
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga PD yang terfasilitasi	12 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100%	-	3 paket	100%
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	24 kali	11 kali	11 kali	11 kali	100%	-	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah distribusi BBM yang terfasilitasi	24 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	3 paket	100%
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak	480 buku	240 buku	240 buku	240 buku	106,25%	-	-	-
		Jumlah pemenuhan barang penggandaan	6.000 lembar	3.000 lembar	92.052 lembar	92.052 lembar	100,20%	-	-	-
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	2 paket	100%
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	6 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	3 dokumen	100%
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pemenuhan pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah untuk koordinasi dan rapat	24 kali	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%		-	-
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	-		12 laporan	100%
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana	100%	100%	100%	82,35%	82,35%		100%	100%
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	16 Jenis	8 jenis	34 unit	28 unit	82,35%		-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-		3 unit	100%
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	83,33%	83,33%		100%	100%
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis belanja persuratan yang tercukupi	4 jenis	2 jenis	3 jenis	1 jenis	50%		-	-
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	24 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%		-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	-	-		30 laporan	100%
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	8 jenis	3 jenis	4 jenis	3 jenis	100%		3 laporan	100%
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	95%	95%	95%	100%	105,26%		95%	100%
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%		-	-
		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan pajaknya	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%		-	-
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	-	-	-		1 unit	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	58 unit	29 unit	29 unit	29 unit	100%		-	-
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dibayarkan pajaknya	58 unit	29 unit	29 unit	29 unit	100%		-	-
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	-	-		26 unit	95%
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	100%		-	-
5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	221 jenis	111 jenis	54 Jenis	54 Jenis	100%		-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	-	-	-	-		72 unit	93%
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks kualitas ASN	0,85	0,85	0,85	0,81	95,29%		0,85	100%
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase usulan formasi yang diusulkan ke Kemenpan	82%	81%	81%	131%	162%		81%	100%
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen penyusunan kebutuhan pegawai ASN	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%		1 dokumen	100%
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah kegiatan proses pengadaan ASN	3 keg	3 kegiatan	3 keg	3 keg	100%		1 dokumen	100%
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pensiun yang didistribusikan tepat waktu	595 SK	568 SK	568 SK	568 SK	100%		595 dokumen	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah pengembangan modul sistem informasi kepegawaian	1 modul	1 modul	1 modul	1 modul	100%		1 modul	100%
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan layanan mutasi, promosi dan Kenaikan Pangkat	86%	84%	84%	82,36%	76%		86%	98%
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah surat permintaan persetujuan pindah/persetujuan pindah antar daerah yg diproses	25	24 surat	24 surat	31 surat	97%		-	-
		Jumlah keputusan pemberhentian PNS dari JP, JA, dan JPTP yg diproses	5 SK	5 SK	262 SK	262 SK	100%		-	-
		Jumlah keputusan mutasi staf yang diproses	135 SK	130 SK	130 SK	32 SK	24,61%		-	-
		Jumlah surat ijin/SK PNS yang bertugas pada instansi lain yg diproses	3 SK	3 SK	3 SK	0 SK	0		-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	-	-	-	-	-		168 dokumen	96%
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK kenaikan pangkat yang diusulkan	1150 SK	1.300 SK	900 SK	849 SK	89,37%			
		Jumlah surat kenaikan gaji berkala ASN yang diterbitkan	4058 SK	4789 SK	3944 SK	3667 SK	92,98%		-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Peserta ujian dinas dan ujian KPPI yang lulus	150 orang	145 orang	118 orang	117 orang	99,15%		-	-
		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	-	-	-	-	-		5208 dokumen	100%
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	1. Jumlah dokumen seleksi terbuka pengisian JPTP (Berita Acara Penilaian Akhir) yang	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	200%		-	-
		2. Jumlah pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PP, PA, dan PPTP yang diproses	2 kali	2 kali	3 kali	4 kali	133,33%		-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	-	-	-	-	-		3 dokumen	100%
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi	90%	87%	87%	83,70%	96,20%		100%	111%
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1. Jumlah peningkatan kompetensi PNS melalui tugas belajar	4 orang	2 orang	2 orang	2 orang	100%		4 orang	100%
		2. Jumlah peningkatan kompetensi PNS melalui Ijin Belajar	70 orang	65 orang	60 orang	48 orang	73,85%		65 orang	93%
		3. Jumlah peningkatan kompetensi PNS melalui penambahan Gelar Akademik	40 orang	35 orang	30 orang	149 orang	114,62%		35 orang	88%
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	-	-	-	-	-		72 orang	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah SK jabatan fungsional yang diproses	530 SK	525 SK	525 SK	792 SK	150,86%		525 SK	99%
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1. Persentase pelanggaran disiplin ASN tahun berkenaan	0.2%	0,2%	0,2%	0,35%	25%		0,2%	100%
		2. Persentase ASN yang memperoleh penghargaan	98%	98%	98%	98%	100%		98%	100%
		Indeks Kinerja ASN	-	-	-	-	-		0,98	100%
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah SKP ASN yang terverifikasi	8.563	8.563 SKP	7.855 SKP	7.717 SKP	91,4%		-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	-	-	-		4 dokumen	100%
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	1. Jumlah surat izin cuti, Karpeg, KAris/Karsu, Kli m Taspen, Satya Lancana dan JKK/JKM yg diterbitkan	2.171	2.056	1.577 Dokumen	2.366 Dokumen	150%		1.925	89%
		2.1 Persentase seleksi aparatur berprestasi yang menang	2%	2%	2%	2%	100%		2%	100%
		2.2 Jumlah kegiatan senam ASN	42	43 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	100%		40 kegiatan	95%
		2.3 Jumlah ASN yang difasilitasi pemeriksaan kesehatan	23	22 orang	18 orang	14 orang	77,8%		22 orang	96%
		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	-	-	-	-	-		1332 orang	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program <i>(outcomes)</i> / Kegiatan <i>(output)</i>	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang dikenakan hukuman disiplin	16 orang	17 orang	17 orang	26 orang	152,94%		-	-
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	-	-	-	-	-		16 orang	100%
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai dimensi kompetensi pada IP ASN	20	19	19	17,74	93,36%		19	95%
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	100%	100%	100%	150,17%	150,17%		100%	100%
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti pengembangan kompetensi teknis	200 orang	220 orang	405 orang	741 orang	182,93%		201 orang	100%
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta AKPK dan EDD	150	145 orang	145 orang	145 orang	100%		145 orang	97%
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	-	-	-	-	-		2 dokumen	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program <i>(outcomes)</i> / Kegiatan <i>(output)</i>	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pemerintahan Umum								
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase aparatur yang lulus sertifikasi dan pengembangan kompetensi manajerial	100%	100%	100%	97,05%	99%		100%	100%
5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi dan assesment / uji kompetensi	120 orang	120 orang	406 orang	388 orang	95,57%		-	-
		Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-		265 orang	100%
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah pejabat struktural yang mengikuti PKP, PKA, dan PKN Tk.II	44 orang	48 orang	24 orang	24 orang	100%		-	-
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	-	-	-	-	-		4 laporan	100%
5.04.02.2.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah CPNS peserta Latsar CPNS	228 orang	187 orang	181 orang	181 orang	100%		-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program <i>(outcomes)</i> / Kegiatan <i>(output)</i>	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	-	-	-	-	-		50 dokumen	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 2019-2022 kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang telah memenuhi standar operasional pelayanan yang telah ditentukan. Analisis kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang dalam kurun waktu tahun 2019 – 2023 dapat disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM/ standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah				Ket
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5					6				7
1.	Persentase ASN yang mempunyai nilai SKP berkategori baik	-	-	98%	98%	-	-	-	98.23	99.45	-	-	-
2.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Aparatur sesuai formasi	-	-	81%	82%	-	-	-	89	NA	-	-	-
3.	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan lulus dengan predikat minimal memuaskan	-	-	95%	96%	-	-	-	99.05	100	-	-	-
4.	Persentase Penataan ASN sesuai dengan kompetensi	-	-	91%	92%	-	-	-	77.64	80.18	-	-	-
5.	Persentase usulan formasi yang diusulkan ke Kemenpan	-	-	-	-	80%	81%	82%	-	-	80%	131%	-
6.	Persentase ASN yang mendapatkan layanan mutasi, promosi dan Kenaikan Pangkat	-	-	-	-	82%	84%	86%	-	-	82%	82.36 %	-
7.	Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi	-	-	-	-	85%	87%	90%	-	-	85%	83.70 %	-
8.	Persentase pelanggaran disiplin ASN tahun berkenaan	-	-	-	-	0.2%	0.2%	0.2%	-	-	0.2%	0.35 %	-
9.	Persentase ASN yang memperoleh penghargaan	-	-	-	-	98%	98%	98%	-	-	98%	98%	-



No	Indikator	SPM/ standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah				Ket
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5					6				7
10.	Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	150.17%	-
11.	Persentase aparatur yang lulus sertifikasi dan pengembangan kompetensi manajerial	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	97.05%	-

Mendasar pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selama tahun 2019 – 2022 rata-rata baik, hal ini dapat dilihat dari capaian pelayanan yang dihasilkan sesuai dengan target yang telah ditentukan, bahkan ada yang melebihi target meskipun ada beberapa target dibawah dikarenakan adanya aturan baru berkaitan dengan disiplin pegawai sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia juga harus memperhatikan isu-isu penting yang berkembang, baik isu dari dalam maupun dari diluar OPD demi tercapaianya tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis OPD. Isu-isu penting tersebut didapatkan dari analisa identifikasi permasalahan maupun kondisi yang menciptakan peluang dan hambatan.

Adapun beberapa permasalahan, hambatan dan peluang yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang adalah :

1. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan, pedoman ataupun petunjuk teknis, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan sistem perencanaan pembangunan manajemen ASN
2. Dimensi IP ASN dari sisi kompetensi masih rendah khususnya dalam hal keikutsertaan ASN dalam pengembangan kompetensi melalui seminar/workshop dan sejenisnya serta belum optimalnya kebijakan pengembangan kompetensi Pejabat Fungsional terutama hasil penyetaraan yang belum mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan.

3. Disiplin ASN kurang optimal karena pemahaman, kesadaran dan kepatuhan tentang aturan disiplin PNS (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil).
4. Adanya pengurangan jumlah ASN karena pensiun setiap tahunnya sedangkan pengadaan ASN menunggu kebijakan pusat;
5. Belum optimalnya kualitas Data ASN;
6. Adanya ketidaksinkronan data kepegawaian dari SIAP ASN (database kabupaten) dengan data di SIASN (database BKN);
7. Belum adanya standar analisa jabatan ASN;
8. Belum tersedianya data kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan analisa kebutuhan diklat secara menyeluruh;
9. Masih adanya ASN yang berkinerja dibawah baik sehingga kinerja pemerintah menjadi rendah;
10. Evaluasi dan tindak lanjut program, kegiatan dan sub kegiatan belum optimal;
11. Belum optimalnya penggunaan data dan informasi kepegawaian;
12. Belum optimalnya pelaksanaan Pola Karir, penempatan ASN masih ada yang belum sesuai dengan standart kompetensi jabatan serta kualitas kinerja dan kompetensi aparatur kurang optimal;
13. Pelaksanaan Manajemen Kesejahteraan Pegawai Belum Optimal (Penghargaan, Sakit, ASN Rentan Cek Up Rutin Kesehatan);
14. Adanya kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi kegagalan pencapaian target kinerja;
15. Penambahan fitur berbasis android dalam SIAP ASN, untuk memberikan informasi kepada ASN terkait kelengkapan berkas pengajuan layanan kepegawaian dan posisi pengajuan sehingga pelayanan administrasi kepegawaian kadang terjadi keterlambatan dan kurang optimal.
16. Adanya koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan instansi terkait sehingga proses pelaksanaan manajemen ASN mulai pengadaan sampai dengan pensiun dapat diminimalisir.

Memperhatikan beberapa permasalahan, hambatan dan peluang yang ada, maka isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya antara lain:

- a. Profesionalitas ASN masih rendah.

Pada tahun 2022 Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kabupaten Jombang masuk dalam kategori sangat rendah (60.58) sebagaimana hasil pengukuran pada aplikasi SIASN milik BKN per 3 Januari 2023. Nilai ini merupakan nilai sementara karena sampai dengan bulan Juli 2023 masih diberikan kesempatan penginputan data sebelum



adanya penetapan keputusan BKN). Sehingga perlu ditingkatkan nilai Indeks Profesioanlitas ASN khususnya pada dimensi kompetensi, kinerja serta disiplin pegawai.

b. Implementasi Sistem Merit belum optimal

Pada tahun 2022 Nilai Sistem Merit Kabupaten Jombang sebesar 295. Perlu dioptimalkan penempatan PNS yang merata dan pola pembinaan karir yang jelas serta sesuai dengan kompetensinya dan juga peningkatan kualitas kinerja dan kompetensi ASN melalui pengembangan kompetensi aparatur, Peningkatan kesejahteraan ASN serta penambahan fitur berbasis android dalam SIAP ASN, untuk memberikan informasi kepada ASN terkait kelengkapan berkas pengajuan layanan kepegawaian dan posisi pengajuan sehingga pelayanan administrasi kepegawaian kadang terjadi keterlambatan dan kurang optimal.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang sebagai perangkat daerah dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan sesuai dengan proses bisnis harus mendukung sasaran daerah yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat disajikan dalam tabel review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2024 dibandingkan dengan hasil analisa kebutuhan yang merupakan rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program Kepegawaian Daerah	Kab. Jombang	Nilai Sistem Merit Bidang Kepegawaian Daerah	267	2.903.627,63	Program Kepegawaian Daerah	Kab. Jombang	Nilai Sistem Merit Bidang Kepegawaian Daerah	267	2.903.627,63	
2.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kab. Jombang	Nilai Sistem Merit Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	37	2.209.452,3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kab. Jombang	Nilai Sistem Merit Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	37	2.209.452,3	
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur BKPSDM	93 %	7.922.568	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Jombang	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur BKPSDM	93 %	7.922.568	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang, beberapa diantaranya untuk mengakomodasi masukan-masukan dari stakeholder yang dalam hal ini adalah Aparatur Sipil Negara dan perubahan regulasi bidang kepegawaian. Usulan program dan kegiatan tersebut diperoleh saat dilaksanakan Forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada hari Selasa, 28 Pebruari 2023 yakni Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Awal Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang Tahun 2024. Forum Perangkat Daerah ini diikuti oleh perwakilan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang dan stakeholder (Taspen).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dokumen Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, dan bersumber dari dokumen Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024-2026. Renstra Tahun 2024-2026 bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten. RPD Kabupaten bersumber juga dari RPJMD Propinsi yang bersumber pada RPJP Nasional dan RPJM Nasional. Dari RPJM Nasional melahirkan Renstra Kementerian. Renstra Kementerian yang relevan dan searah dengan Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang adalah Renstra Kementerian PAN-RB dan BKN Pusat. Untuk itu ditampilkan Visi dan Misi Kementerian PAN-RB dan BKN Pusat sebagai berikut:

1. Kementerian PAN-RB

Untuk lebih menajamkan pemahaman visi dan misi RPJMN dan juga untuk lebih mendefinisikan nawa cita yang terkandung dalam visi dan misi tersebut, Kementerian PANRB telah merumuskan visi dan misi sebagai berikut :

Visi : Mewujudkan Aparatur Negara Yang Berkepribadian, Bersih dan Kompeten Untuk Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Berkinerja Tinggi.

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Kementerian PANRB untuk menjadikan seluruh aparatur negara di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah memiliki kepribadian yang bersih dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari serta memiliki kompetensi yang dapat diandalkan untuk selalu berkinerja tinggi dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat.

Dalam rangka mencapai visinya tersebut, Kementerian PANRB telah merumuskan dan menetapkan beberapa misi yang harus diembannya, yaitu:

1. Mengembangkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.
2. Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif.
3. Menciptakan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.
4. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya ditetapkan tujuan Kementerian PANRB sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif dan Efisien;
2. Terwujudnya SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif;
3. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi;
4. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Baik dan Berkualitas;

5. Terwujudnya Aparatur Kementerian PANRB yang profesional dan berkinerja tinggi.

Dari tujuan yang telah ditetapkan di atas, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran-sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya oleh Kementerian PANRB, sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2. Peningkatan kelembagaan dan talaksana pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses
3. Terwujudnya tata laksana pemerintahan yang berbasis Elektronik
4. Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten
5. Terwujudnya SDM Aparatur yang kompetitif
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja
7. Meningkatnya penerapan system integritas
8. Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pelayanan public
9. Meningkatnya kualitas pelayanan public
10. Terwujudnya Kem.PANRB yg efektif dan efisien
11. Terwujudnya Kem.PANRB yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi
12. Terwujudnya pelayanan publik Kem.PANRB yang berkualitas

Sasaran dari Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kabupaten Jombang adalah “Meningkatnya kualitas kinerja dan kompetensi aparatur”, yang mana unsur yang terkandung didalamnya selaras dengan sasaran keempat, lima dan enam dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi yaitu Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten, Terwujudnya SDM Aparatur yang kompetitif dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja.

2. BKN Pusat

Dalam perencanaan jangka menengah, BKN berkomitmen untuk membangun sistem manajemen PNS yang dituangkan dalam visi BKN, yaitu : “Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan misi BKN sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pelayanan kepegawaian
2. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian.

3. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem peraturan perundang-undangan, kinerja dan kesejahteraan pegawai.
4. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi manajemen kepegawaian.
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN.

Dalam rangka mewujudkan misi dan melaksanakan misi, ditetapkan tujuan BKN sebagai berikut:

1. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang modern dengan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional.
2. Mewujudkan pelayanan prima di bidang kepegawaian
3. Mewujudkan manajemen internal yang efektif, efisien dan akuntabel.

Sasaran BKN dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan adalah sebagai berikut : “Meningkatnya tingkat profesionalisme pegawai ASN”.

Sasaran dari Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kabupaten Jombang adalah “Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN” dan “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah” yang mana unsur yang terkandung didalamnya selaras dengan sasaran BKN yaitu Meningkatkan tingkat profesionalisme pegawai ASN.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tahun 2024 merupakan tahun pertama dari rangkaian pelaksanaan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 di Kabupaten Jombang sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor. 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 tidak dijabarkan dari Visi Misi Kepala Daerah terpilih, namun disusun secara teknokratik dan didasarkan pada Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan Sasaran Pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang tahun 2005-2025. Tujuan Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 terdiri dari 4 tujuan, salah satunya adalah **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif**

serta **Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik**” dengan sasaran **“Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi”**.

Tema Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2024 adalah **“Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan guna peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis agribisnis dan SDM Unggul”** dengan tiga prioritas pembangunan yang menjadi titik beratnya, salah satunya adalah:

“Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketentraman Umum”

Salah satu upaya yang dilakukan dalam pencapaian prioritas dimaksud melalui kebijakan **Peningkatan Inovasi dan Profesionalisme ASN**.

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang melaksanakan fungsi melaksanakan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Mendasar pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sehingga BKPSDM mempunyai peran dan tanggungjawab dalam mendukung pencapaian sasaran dimaksud, dengan menjadikannya sebagai tujuan organisasi.

Tujuan adalah pernyataan yang berisi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan untuk dapat memecahkan masalah dan menangani isu strategis sehingga sekaligus dapat melaksanakan dan mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Dengan memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 dan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2024, maka Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang mempunyai tujuan **“Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi”** dengan indikator **”Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten”** dan **”Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah”**.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran organisasi merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga tiga tahun ke depan. Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. **”Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah”**, dengan indikator **Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah**.

2. **"Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN"**, dengan dua indikator, yaitu (1) **Indeks Profesionalitas ASN** dan (2) **Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit**.

Untuk lebih memahami tujuan, sasaran beserta indikator Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	-	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten	69
	-	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A (81,05
	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	61,5
	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN	Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit	304

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dari Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Pengembangan Kompetensi Teknis Pembinaan Disiplin Pegawai, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;

2. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.
- b) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 2. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan;
 3. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan.
2. Program Kepegawaian Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
 2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK;
 3. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian;
 4. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian.
 - b) Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 1. Pengelolaan Mutasi ASN;
 2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
 3. Pengelolaan Promosi ASN.
 - c) Pengembangan Kompetensi ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 1. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN;
 2. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional.
 - d) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 2. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;
 3. Pembinaan Disiplin ASN.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 3. Koordinasi dan Penyusunan Lapoan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD.
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 4. Penyediaan Bahan Logistik;
 - 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- h) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya.

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, target serta pagu indikatif Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran yang tertuang dalam tabel sebagai berikut :



Tabel 3.1.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program,Kegiatan, Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)		(9)
5					URUSAN PEMERINTAHAN					13.035.647.930				16.506.575.000
5	3				KEPEGAWAIAN					10.826.195.630				12.576.706.300
5	3	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur BKPSDM	Kabupaten Jombang	93	%	7.922.568.000		94	%	8.753.826.300
5	3	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan.	Kabupaten Jombang	100	%	28.466.100		100	%	35.000.000
5	3	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Jombang	3	Dokumen	9.983.600		3	Dokumen	15.000.000
5	3	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Jombang	5	Laporan	18.482.500		5	Laporan	20.000.000
5	3	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Kabupaten Jombang	100	%	6.614.815.180		100	%	7.267.060.900
						Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan		100	%	-		100	%	-
5	3	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Jombang	45	Orang/Bulan	6.441.132.180		48	Orang/Bulan	7.084.926.900
5	3	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Jombang	4	Dokumen	170.178.000		4	Dokumen	178.278.000
5	3	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Jombang	5	Laporan	1.058.750		5	Laporan	1.164.800
5	3	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Jombang	16	Laporan	2.446.250		16	Laporan	2.691.200



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program,Kegiatan, Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)		(9)
5	3	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaporan aset yang tersusun sesuai aturan	Kabupaten Jombang	100	%	499.800		100	%	500.000
5	3	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Jombang	12	Laporan	499.800		12	Laporan	500.000
5	3	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD	Kabupaten Jombang	95	%	25.200.000		95	%	33.600.000
5	3	01	2.05	0002	Pengadaan pakain Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	Kabupaten Jombang	42	Paket	25.200.000		96	Paket	33.600.000
5	3	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Jombang	100	%	413.722.800		100	%	415.279.400
5	3	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Jombang	1	Paket	7.134.200		1	Paket	6.784.000
5	3	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Jombang	4	Paket	78.690.200		4	Paket	80.000.000
5	3	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga PD yang terfasilitasi	Kabupaten Jombang	1	Paket	2.075.900		1	Paket	2.080.000
5	3	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Jombang	3	Paket	144.430.000		3	Paket	145.000.000
5	3	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Jombang	2	Paket	83.013.300		2	Paket	83.013.700
5	3	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kabupaten Jombang	3	Dokumen	4.906.200		3	Dokumen	4.906.200
5	3	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Jombang	1	Laporan	93.473.000		12	Laporan	93.495.500
5	3	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Kabupaten Jombang	95	%	316.552.350		95	%	466.000.000
5	3	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Jombang	64	Unit	316.552.350		17	Unit	466.000.000
5	3	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Kabupaten Jombang	100	%	255.702.542		100	%	255.702.600



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program,Kegiatan, Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)		(9)
5	3	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Jombang	37	Laporan	101.658.590		37	Laporan	101.658.600
5	3	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Jombang	4	Laporan	154.043.952		4	Laporan	154.044.000
5	3	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Kabupaten Jombang	95	%	267.609.228		95	%	280.683.400
5	3	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Jombang	1	Unit	41.010.000		1	Unit	41.010.000
5	3	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Jombang	26	Unit	109.643.400		26	Unit	109.643.400
5	3	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Kabupaten Jombang	1	Unit	64.400.000		1	Unit	80.000.000
5	3	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Jombang	54	Unit	52.555.828		119	Unit	50.030.000
5	3	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Kepegawaian	Kabupaten Jombang	267	Poin	2.903.627.630		273	Poin	3.822.530.000
5	3	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Penerapan Sistem Merit Kewenangan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Sisitem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Jombang	93	Poin	1.526.540.000		94	Poin	1.957.200.000
5	3	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kabupaten Jombang	2	Dokumen	944.775.500		2	Dokumen	1.300.950.000
5	3	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kabupaten Jombang	1	Dokumen	484.119.900		1	Dokumen	525.000.000
5	3	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Jombang	1	Dokumen	97.644.600		1	Dokumen	131.250.000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program,Kegiatan, Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)		(9)
5	3	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya	Kabupaten Jombang	81	%	670.923.500		81,25	%	979.330.000
						Nilai Penerapan Sistem Merit Kewenangan Bidang Pengembangan Karir		67,5	Poin	-		70	Poin	-
5	3	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kabupaten Jombang	4	Dokumen	151.450.000		4	Dokumen	236.374.000
5	3	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kabupaten Jombang	5	Dokumen	155.410.500		5	Dokumen	341.600.000
5	3	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kabupaten Jombang	2	Dokumen	364.063.000		2	Dokumen	401.356.000
5	3	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi	Kabupaten Jombang	84,5	%	165.542.500		84,75	%	207.000.000
5	3	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kabupaten Jombang	50	Orang	105.587.500		50	Orang	121.000.000
5	3	02	2.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Kabupaten Jombang	600	Orang	59.955.000		500	Orang	86.000.000
5	3	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang berkinerja minimal baik	Kabupaten Jombang	75	%	540.621.630		77	%	679.000.000
						Persentase Penangan Pelanggaran disiplin ASN tahun berkenaan		90	%	-		93	%	-
						Nilai Penerapan Sistem Merit Kewenangan Bidang Kinerja		106,5	Poin	-		109	Poin	-
5	3	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Jombang	5	Dokumen	76.083.810		5	Dokumen	76.500.000
5	3	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kabupaten Jombang	303	Orang	196.260.050		303	Orang	196.500.000
5	3	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kabupaten Jombang	50	Orang	268.277.770		50	Orang	406.000.000
5	4	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Jombang	37	Poin	2.209.452.300		39,5	Poin	3.929.868.700
5	4	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis sesuai dengan kebutuhan	Kabupaten Jombang	100	%	790.286.700		100	%	856.572.200



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program,Kegiatan, Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)		(9)
5	4	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kabupaten Jombang	241	Orang	760.125.000		289	Orang	825.000.000
5	4	02	2.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kabupaten Jombang	2	Dokumen	30.161.700		2	Dokumen	31.572.200
5	4	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase aparatur yang lulus sertifikasi pengembangan kompetensi manajerial/dasar	Kabupaten Jombang	100	%	1.419.165.600		100	%	3.073.296.500
						Nilai Penerapan Sistem Merit Kewenangan Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	Kabupaten Jombang	37	Poin	-		39,5	Poin	-
5	4	02	2.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Kabupaten Jombang	145	Orang	404.853.500		322	Orang	922.696.500
5	4	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kabupaten Jombang	3	Laporan	969.265.700		3	Laporan	940.800.000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program,Kegiatan, Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)		(9)
5	4	02	2.02	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Kabupaten Jombang	2	Dokumen	45.046.400		2	Dokumen	1.209.800.000



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 sebagai berikut:

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun Rencana) 2024				Catatan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				13.035.647.930		
5.03	KEPEGAWAIAN				10.826.195.630	Dana Alokasi Umum	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur BKPSDM	Kabupaten Jombang	93 %	7.922.568.000	Dana Alokasi Umum	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	Kabupaten Jombang	100 %	28.466.100	Dana Alokasi Umum	
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Jombang	3 Dokumen	9.983.600	Dana Alokasi Umum	
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Jombang	5 Laporan	18.482.500	Dana Alokasi Umum	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Kabupaten Jombang	100 %	6.614.815.180	Dana Alokasi Umum	
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	Kabupaten Jombang	100 %			
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Jombang	45 Orang/Bulan	6.441.132.180	Dana Alokasi Umum	
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Jombang	4 Dokumen	170.178.000	Dana Alokasi Umum	
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Jombang	5 Laporan	1.058.750	Dana Alokasi Umum	
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Jombang	16 Laporan	2.446.250	Dana Alokasi Umum	
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaporan aset yang tersusun sesuai aturan	Kabupaten Jombang	100 %	499.800	Dana Alokasi Umum	
5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kabupaten Jombang	12 Laporan	499.800	Dana Alokasi Umum	
5.03.01.2.05	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD	Kabupaten Jombang	95 %	25.200.000	Dana Alokasi Umum	
5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	Kabupaten Jombang	42 Paket	25.200.000	Dana Alokasi Umum	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Jombang	100 %	413.722.800	Dana Alokasi Umum	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun Rencana) 2024				Catatan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Jombang	1 Paket	7.134.200	Dana Alokasi Umum	
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Jombang	4 Paket	78.690.200	Dana Alokasi Umum	
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga PD yang terfasilitasi	Kabupaten Jombang	1 Paket	2.075.900	Dana Alokasi Umum	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Jombang	3 Paket	144.430.000	Dana Alokasi Umum	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Jombang	2 Paket	83.013.300	Dana Alokasi Umum	
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kabupaten Jombang	3 Dokumen	4.906.200	Dana Alokasi Umum	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Jombang	1 Laporan	93.473.000	Dana Alokasi Umum	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Kabupaten Jombang	95 %	316.552.350	Dana Alokasi Umum	
5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Jombang	64 Unit	316.552.350	Dana Alokasi Umum	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Kabupaten Jombang	100 %	255.702.542	Dana Alokasi Umum	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Jombang	37 Laporan	101.658.590	Dana Alokasi Umum	
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Jombang	4 Laporan	154.043.952	Dana Alokasi Umum	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Kabupaten Jombang	95 %	267.609.228	Dana Alokasi Umum	
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Jombang	1 Unit	41.010.000	Dana Alokasi Umum	
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Jombang	26 Unit	109.643.400	Dana Alokasi Umum	
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kabupaten Jombang	1 Unit	64.400.000	Dana Alokasi Umum	
5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kabupaten Jombang	54 Unit	52.555.828	Dana Alokasi Umum	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Kepegawaian	Kabupaten Jombang	267 Poin	2.903.627.630	Dana Alokasi Umum	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Penerapan Sistem Merit Kewenangan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Sisitem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Jombang	93 Poin	1.526.540.000	Dana Alokasi Umum	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kabupaten Jombang	2 Dokumen	944.775.500	Dana Alokasi Umum	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun Rencana) 2024				Catatan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kabupaten Jombang	1 Dokumen	484.119.900	Dana Alokasi Umum	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Jombang	1 Dokumen	97.644.600	Dana Alokasi Umum	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya	Kabupaten Jombang	81 %	670.923.500	Dana Alokasi Umum	
		Nilai Penerapan Sistem Merit Kewenangan Bidang Pengembangan Karir	Kabupaten Jombang	67,5 Poin			
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kabupaten Jombang	4 Dokumen	151.450.000	Dana Alokasi Umum	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kabupaten Jombang	5 Dokumen	155.410.500	Dana Alokasi Umum	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kabupaten Jombang	2 Dokumen	364.063.000	Dana Alokasi Umum	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi	Kabupaten Jombang	84,5 %	165.542.500	Dana Alokasi Umum	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kabupaten Jombang	50 Orang	105.587.500	Dana Alokasi Umum	
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Kabupaten Jombang	600 Orang	59.955.000	Dana Alokasi Umum	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang berkinerja minimal baik	Kabupaten Jombang	75 %	540.621.630	Dana Alokasi Umum	
		Persentase Penangan Pelanggaran disiplin ASN tahun berkenaan	Kabupaten Jombang	90 %			
		Nilai Penerapan Sistem Merit Kewenangan Bidang Kinerja	Kabupaten Jombang	106,5 Poin			
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Jombang	5 Dokumen	76.083.810	Dana Alokasi Umum	
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kabupaten Jombang	303 Orang	196.260.050	Dana Alokasi Umum	
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kabupaten Jombang	50 Orang	268.277.770	Dana Alokasi Umum	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Jombang	37 Poin	2.209.452.300	Dana Alokasi Umum	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis sesuai dengan kebutuhan	Kabupaten Jombang	100 %	790.286.700	Dana Alokasi Umum	
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kabupaten Jombang	241 Orang	760.125.000	Dana Alokasi Umum	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun Rencana) 2024				Catatan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kabupaten Jombang	2 Dokumen	30.161.700	Dana Alokasi Umum	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase aparatur yang lulus sertifikasi pengembangan kompetensi manajerial/dasar	Kabupaten Jombang	100 %	1.419.165.600	Dana Alokasi Umum	
		Nilai Penerapan Sistem Merit Kewenangan Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	Kabupaten Jombang	37 Poin			
5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tertsertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Kabupaten Jombang	145 Orang	404.853.500	Dana Alokasi Umum	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kabupaten Jombang	3 Laporan	969.265.700	Dana Alokasi Umum	
5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Kabupaten Jombang	2 Dokumen	45.046.400	Dana Alokasi Umum	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 ini merupakan acuan atau dasar dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkup Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang. Dengan adanya dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 ini diharapkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan akan dapat terarah, terukur dan terkendali sehingga tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rencana Kerja ini mengacu pada Rencana Strategis Perubahan Tahun 2024-2026 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang Tahun serta mendasarkan pada hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2022 yang meliputi :

1. Bahwa sasaran dan program kerja yang ada dalam Rencana Kerja Tahunan ini merupakan satu kesatuan yang berkesinambungan dengan Rencana Strategi Tahun 2024-2026 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang;
2. Penyusunan rencana kerja merupakan rencana pencapaian kinerja tahunan dimana penyusunannya akan dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran (APBD) yang sekaligus merupakan komitmen dari Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang untuk mencapainya dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
3. Bahwa keseluruhan program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang tidak terlepas dari peran serta dari seluruh Aparatur Sipil Negara yang ada di Kabupaten Jombang, maka perlu adanya kerjasama yang baik dengan seluruh unit kerja.

Pada akhirnya keberhasilan dan kendala program yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang, nantinya akan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan program kerja tahun mendatang, sehingga Program dan Kegiatan akan lebih baik dan terarah.

Jombang, 13 Juli 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN JOMBANG**



BAMBANG SUNTOWO, S.E., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196709041992021002